

## **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Melakukan Kecurangan (*Fraud*) pada Aparatur Sipil Negara (ASN)**

**Wilda Farah<sup>1\*</sup>, Dwi Rahmawati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>1</sup>wilda\_farah@uinjkt.ac.id; <sup>2</sup>dwirahmawi@gmail.com

<sup>\*)</sup>Penulis korespondensi

### **Abstract**

The purpose of this study is to examine and produce empirical evidence regarding the factors influencing the intention to commit fraud such as the remuneration system, the government internal control system (SPIP) and the rationalization attitude. This study used a sample of 108 respondents. Respondents in this study were state civil servants (ASN) throughout Indonesia. Data analysis used multiple linear regression analysis and with the help of the SPSS 25 program. The results of this study indicate that there is a significant negative influence of the remuneration system and government control system (SPIP) on the intention to commit fraud. Meanwhile, rational attitude has a positive significant influence on the intention to commit fraud (*fraud*). Then for the variable remuneration system, government control system (SPIP) and the attitude of rationalization simultaneously influence the intention to commit fraud for Official Servant (ASN).

**Keywords:** Remuneration System, Government Intern Control System, Rationalization Attitude, Intention to commit fraud, Official Servant

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat melakukan kecurangan pada ASN (Aparatur Sipil Negara). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem remunerasi, sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan sikap rasionalisasi. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah metode kuantitatif dan menggunakan teknik kuesioner pada 108 sampel. Data analisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan dengan bantuan program SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan negatif dalam pengaruh sistem remunerasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap niat melakukan kecurangan (*fraud*). Sedangkan sikap rasionalisasi berpengaruh signifikan positif terhadap niat melakukan kecurangan (*fraud*). Kemudian untuk variabel Sistem remunerasi, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan sikap rasionalisasi berpengaruh secara parsial terhadap niat melakukan kecurangan (*fraud*).

**Kata Kunci:** Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sikap Rasionalisasi, Niat Melakukan Kecurangan, Aparatur Sipil Negara

## PENDAHULUAN

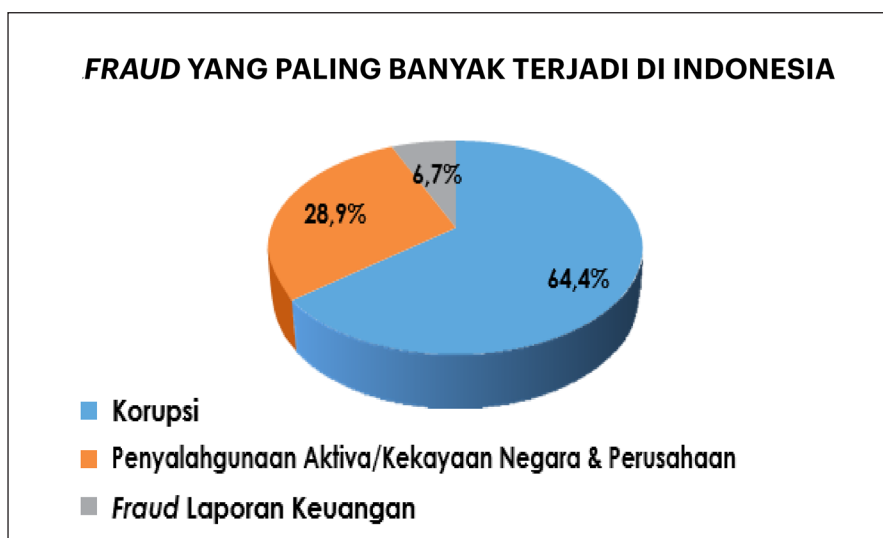
Ekonomi global saat ini berkembang dengan sangat cepat bersamaan dengan kompleksitas dalam berbisnis dan semakin terbukanya peluang usaha serta investasi yang menyebabkan risiko terjadinya kecurangan semakin tinggi. Kecurangan merupakan salah satu hal yang memprihatinkan saat ini. Kecurangan terjadi diberbagai lapisan ekonomi, baik sektor pemerintahan maupun swasta. Kecurangan atau *fraud* yaitu tindakan manipulasi, penggelapan, pencurian, dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh pihak tertentu yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau pemerintah/organisasi.

*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan tindakan *fraud* menjadi tiga kategori, yaitu: (1). Kecurangan aset (*asset misappropriation*), berupa pencurian atau penyalahgunaan aset; (2). Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*), meliputi tindakan yang dilakukan oleh pegawai/eksekutif suatu instansi untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangan instansi guna mendapat keuntungan; dan (3). Korupsi (*corruption*), meliputi pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*) dan pemerasan (*economic extortion*).

Tingkat kecurangan suatu negara ditunjukkan oleh tingkat korupsi dari negara tersebut. Karena itulah untuk mengukur tingkat kecurangan yang terjadi di suatu negara adalah dengan menghitung indeks korupsi nya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Donald Cressey pada tahun 1950-an di USA telah memberikan pengetahuan yang berharga terhadap suatu pertanyaan mengapa tindak kecurangan bisa terjadi. Kebanyakan orang di dunia lebih mengenal istilah "korupsi" (*corruption*) dibanding dengan "kecurangan" (*fraud*). Dalam ilmu akuntansi, korupsi adalah bagian dari kecurangan. Keduanya merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat merugikan pihak lain. Hasil penelitian tersebut menghasilkan apa yang disebut dengan segitiga kecurangan (*triangle of fraud*). Tiga hal yang menjadi komponen dalam segitiga kecurangan sangat berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan Survei *Fraud* Indonesia (SFI) yang dilakukan oleh ACFE Indonesia, *Fraud* menjadi permasalahan yang masih sering terjadi secara terus menerus hingga saat ini. Tidak ada institusi/lembaga instansi yang bersih dan terbebas dari kemungkinan terjadinya *fraud*. Para pelaku *fraud* juga dapat ditemukan disemua lapisan, baik golongan atas maupun golongan pegawai bawah. Maka, saat ini diperlukan kepedulian dari berbagai pihak untuk sadar, waspada dan peduli dengan lingkungan tempat kerja terhadap potensi terjadinya *fraud*. Lembaga *fraud* ACFE melakukan survei tentang *Occupational Fraud and Abuse* secara berkala setiap dua tahun sekali. Survei ini menggambarkan *fraud* yang terjadi diseluruh dunia. Kemudian menerbitkan hasil survei yang diberi nama Report to The Nations (RTTN) yang mulai dilakukan pada tahun 1996 hingga saat ini. RTTN ini dapat digunakan untuk membantu dalam pemecahan masalah *fraud* baik dalam rangka merancang untuk mencegah, mendeteksi dan meng investigasi *fraud*. Berdasarkan hasil Survei *Fraud* Indonesia yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter 239 tahun 2019, *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Gambar 1. *Fraud* yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia

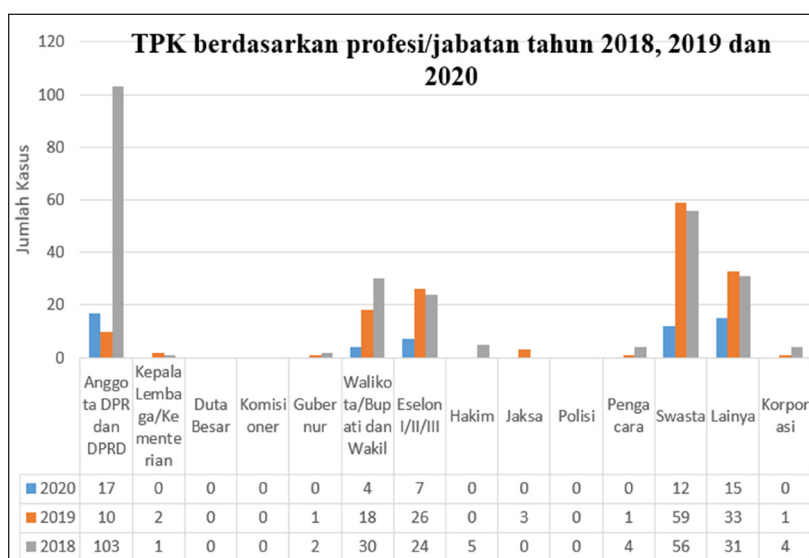


Sumber: Survei ACFE Indonesia, 2019.

Berdasarkan diagram di atas, *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah Korupsi dengan persentase 64.4%, penyalahgunaan aktiva/kekayaan negara 28,9% dan *fraud* laporan keuangan 6,7%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa saat ini Indonesia masih dihantui dengan banyaknya kasus korupsi terutama yang dilakukan oleh sektor pemerintahan.

Beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia adalah kasus Kementerian PUPR, kasus korupsi ekspor benih lobster (benur) dan kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos). Menurut Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tindak pidana korupsi (TPK) yang terjadi berdasarkan profesi/jabatan tahun 2018, 2019, 2020 adalah sebagai berikut:

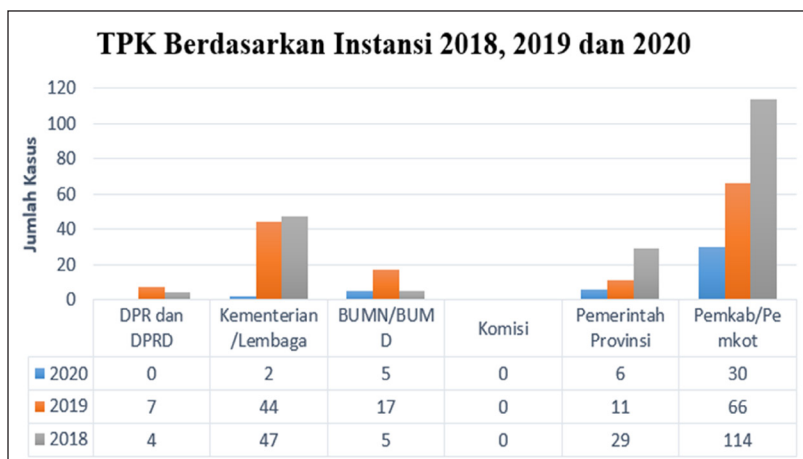
Gambar 2. TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan tahun 2018, 2019, dan 2020



Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

Data pada gambar 2 menunjukkan profesi/jabatan yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi (TPK) tahun 2018 adalah profesi anggota DPR dan DPRD, 2019 swasta dan 2020 anggota DPR/DPRD. Selain itu berdasarkan latar belakang instansi dari pelaku korupsi adalah sebagai berikut:

Gambar 3. TPK Berdasarkan Instansi Tahun 2018, 2019, dan 2020

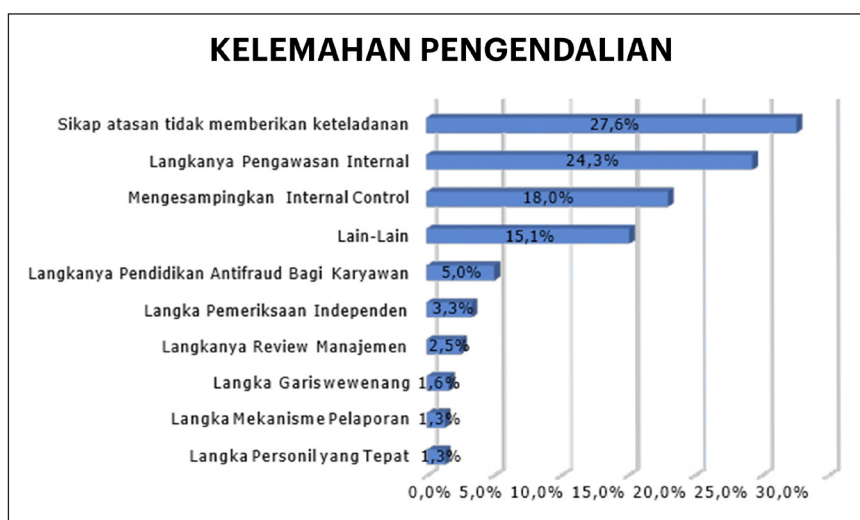


Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>

Berdasarkan data pada gambar 3, jenis instansi yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi selama tahun 2018, 2019, 2020 berturut-turut adalah berasal dari instansi Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota.

Menurut ACFE Indonesia salah satu penyebab kecurangan banyak terjadi adalah karena lemahnya pengendalian yang dimiliki oleh instansi di Indonesia. Menurut Suvei *Fraud* Indonesia tahun 2019 yang dilakukan oleh ACFE Indonesia kelemahan pengendalian yang terjadi dengan bentuk sebagai berikut:

Gambar 4. Kelemahan Pengendalian



Sumber: Survei ACFE Indonesia, 2019.

Dari data pada gambar 4 dapat dilihat bahwa lemahnya pengendalian yang dimiliki instansi merupakan faktor terjadinya berbagai macam kecurangan. Terutama kecurangan dengan jenis korupsi yang banyak terjadi di instansi pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini telah melakukan berbagai upaya agar tindakan *fraud* tidak terjadi, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan mengenai Sistem Remunerasi bagi pegawai pemerintah yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini diharapkan dapat memperkecil kemungkinan pegawai pemerintah dalam melakukan tindak kecurangan (Martaningtyas, 2014). Dalam kebijakan Sistem Remunerasi di Indonesia, kebijakan Sistem Remunerasi merupakan kebijakan yang dibuat untuk menata kembali sistem penggajian para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar para pegawai dapat memiliki kinerja yang lebih baik dari sebelumnya dan agar para pegawai memiliki tanggung jawab lebih sehingga tidak tergiur untuk melakukan tindak kecurangan. Kebijakan Sistem Remunerasi dibuat berdasarkan peraturan dan undang-undang tentang reformasi birokrasi, yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2007 mengenai rencana pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025 dan juga Peraturan Menteri Negara PAN, No. PER/15/M.PAN/7/2008 mengenai pedoman umum reformasi birokrasi. Dari kasus-kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia maka dalam hal ini pentingnya peran dan tanggung jawab para aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan masyarakat. Diharapkan bahwa para ASN dapat menghindari hal-hal yang menjurus terhadap kasus kecurangan seperti, korupsi, suap, penyalahgunaan aset, dan tindakan kecurangan lainnya yang dapat merugikan negara.

Untuk menunjang agar Sistem Remunerasi dalam suatu instansi dapat diterapkan dengan baik, maka diperlukan suatu sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam sektor pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pemerintah menetapkan adanya suatu sistem pengendalian intern yang harus dilaksanakan, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern yang dimaksudkan adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus baik oleh pemimpin maupun seluruh pegawai demi memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). Adanya pengendalian intern yang memadai dapat menciptakan tercapainya kualitas laporan keuangan yang baik. Pengendalian intern tersebut terdiri atas lima komponen yang meliputi: (1) Control environment; (2) Risk assessment; (3) Control activities; (4) Information and communication; (5) Monitoring (COSO, 2009; Arens et al; PP No.60/2008).

Selain itu adanya Sikap Rasionalisasi yang dimiliki individu menjadi salah satu komponen besar yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan *fraud*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dahlia, dkk (2013) menunjukkan bahwa Sikap Rasionalisasi menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam tindakan *fraud* terutama korupsi. Sebagian besar koruptor yang melakukan tindakan korupsi melakukan tindakannya bukan karena adanya tekanan ekonomi ataupun kesempatan namun karena pada umumnya koruptor menganggap bahwa

apa yang dilakukannya adalah hal yang umum terjadi dan tidak melanggar hukum maupun kemanusiaan, sehingga tindakan ini masih banyak terjadi.

Berdasarkan rekomendasi dari *World Bank* (1997) tentang strategi pemberantasan korupsi secara komprehensif salah satunya dengan membangun birokrasi yang berdasarkan ketentuan hukum dengan struktur penggajian yang menghargai kejujuran para pegawai negeri. Di Indonesia sendiri menurut Rusli (2010) menyatakan bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan dan kinerja aparatur, pemerintah menerapkan kebijakan remunerasi. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan terobosan terhadap fenomena yang menunjukkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah selama ini. Terlebih dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi dikalangan aparatur negara yang terjadi hampir disetiap institusi pemerintah baik di pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah yang telah membentuk citra aparatur negara menjadi kurang baik dimata masyarakat.

Sayangnya kebijakan pemberian remunerasi yang telah dijalankan saat ini kurang efektif dan belum menunjukkan hasil yang diinginkan, sebagai contoh di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia setelah beberapa tahun kebijakan remunerasi dijalankan belum mendapat hasil yang signifikan, bahkan tindakan korupsi semakin merajalela dan banyak terjadi. Hal ini berarti bahwa ada sesuatu yang masih kurang dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Remunerasi ini. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herawati, dkk (2017) dan Sujana, dkk (2017) menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap *financial fraud*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Sistem remunerasi berpengaruh negatif terhadap niat melakukan kecurangan (*Fraud*)

Novikasari (2017) mengatakan bahwa menurut PP No 60 tahun 2008 menyatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh komponen instansi baik pimpinan maupun pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu perlunya pengawasan yang ketat dan dilakukan secara rutin menjadi komponen penting untuk terciptanya sistem pengendalian intern yang baik. Dengan adanya pengendalian intern yang baik diharapkan dapat meminimalisir perilaku tidak etis seperti kecurangan dalam instansi atau lembaga yang dapat merugikan instansi atau lembaga itu sendiri.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rendika (2013), Wiliyanti dkk (2014) dan Eliza (2015) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan negatif pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kecenderungan *fraud* sebagai variabel terkait. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh negatif terhadap niat melakukan kecurangan (*Fraud*)

Nardisyah et, al (2019) rasionalisasi adalah suatu perilaku yang mentolerir atau memaklumi individu dalam melakukan kecurangan. Individu tersebut memiliki asumsi bahwa tindakan kecurangan yang dilakukannya adalah tindakan yang biasa dan wajar. Rasionalisasi juga didefinisikan sebagai bentuk sikap dan cara berpikir yang didasari dengan berbagai pertimbangan moral individu pegawai untuk merasionalisasikan perilaku kecurangan tersebut dengan menggunakan beragam alasan sebagai bentuk pembenaran yang dilakukan atas perilakunya. Pelaku yang melakukan tindak kecurangan ini berkeyakinan bahwa tindakan yang dilakukan adalah bukan termasuk tindakan kecurangan melainkan sebuah hak yang wajar untuk didapatkan pelaku. Keyakinan yang dimiliki pelaku didasari atas kinerja yang telah dilakukannya selama ini yang diberikan oleh organisasi kepada dirinya (Zulkarmain, 2013). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zahra (2017) menjelaskan bahwa Sikap Rasionalisasi memiliki pengaruh yang disignifikan positif terhadap niat melakukan kecurangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Sikap rasionalisasi berpengaruh positif terhadap niat melakukan kecurangan (*Fraud*)

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer. Penelitian ini bertujuan ini untuk menguji pengaruh dari variabel independen yaitu sistem remunerasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan sikap rasionalisasi terhadap variabel dependen yaitu niat melakukan kecurangan (*Fraud*). Untuk mendapatkan hasil yang signifikan, maka penelitian ini mengambil ruang lingkup seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Instansi Pemerintah. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *convenience sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Metode analisis dilakukan dengan bantuan *software* SPSS versi 25.

## **Definisi Operasional**

### **Sistem Remunerasi**

Remunerasi memiliki pengertian yaitu sesuatu yang diterima pegawai sebagai bentuk imbalan dari kontribusi yang telah diberikannya kepada organisasi tempat di mana pegawai tersebut bekerja. Remunerasi memiliki makna yang lebih luas daripada gaji, karena mencakup semua bentuk imbalan, baik yang berbentuk uang maupun barang, diberikan secara langsung maupun tidak langsung, dan bersifat rutin maupun tidak rutin. Imbalan langsung tersebut terdiri dari gaji/upah, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, bonus yang dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan prestasi kerja dan kinerja organisasi, intensif sebagai penghargaan prestasi, dan berbagai jenis bantuan yang diberikan secara rutin. Imbalan tidak langsung yaitu berupa fasilitas, kesehatan, dana pensiun, gaji selama cuti, santunan musibah dan sebagainya (Nugroho dkk, 2014).

### **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Pengendalian intern perlu diterapkan dalam suatu instansi, termasuk instansi pemerintah, hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir penyelewengan yang dilakukan oleh pihak

tertentu. Menurut peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien sehingga dapat mendeteksi serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

### Sikap Rasionalisasi

Sikap rasionalisasi (*rationalization*) adalah sikap/karakter yang memperbolehkan atau membenarkan seseorang untuk melakukan kecurangan ataupun tindakan seseorang dalam mencari berbagai alasan untuk merasionalkan tindakan mereka (Edi et al, 2018). Rasionalisasi membuat seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan kecurangan menjadi ingin melakukan kecurangan. Rasionalisasi merupakan suatu alasan yang kesannya membenarkan tindakan kecurangan dan merupakan hal yang sewajarnya (Gamayuni, 2015).

### Uji Hipotesis

Data yang berhasil dikumpulkan dianalisa menggunakan analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini persamaan regresi yang digunakan ialah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Niat Melakukan Kecurangan (*Fraud*)

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien Regresi

X<sub>1</sub> : Sistem Remunerasi

X<sub>2</sub> : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

X<sub>3</sub> : Sikap Rasionalisasi

e : Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Instansi Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 108 responden.

### Uji Kualitas Data

Hasil uji validitas semua variabel menunjukkan bahwa variabel sistem remunerasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sikap rasionalisasi dan niat melakukan kecurangan (*Fraud*) mempunyai kriteria valid yaitu dengan nilai signifikansi <0,05 untuk semua butir pernyataan. Hal ini berarti bahwa pernyataan-pernyataan terkait semua variabel pada kuesioner yang dibuat dan dibagikan peneliti mampu mengukur keseluruhan variabel. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk variabel Sistem Remunerasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sikap



Rasionalisasi dan Niat Melakukan Kecurangan (*Fraud*) adalah lebih besar dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan yang digunakan akan mampu mendapatkan data yang relatif konsisten dengan jawaban sebelumnya.

### Uji Hipotesis

Hasil uji koefisien determinasi sesuai hasil pengolahan SPSS 25 pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,541. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem remunerasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sikap rasionalisasi dapat menjelaskan 54,1% variabel niat melakukan kecurangan (*Fraud*) sedangkan sisanya yaitu 45,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian yang yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian statistik F diketahui bahwa nilai signifikansi adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa model penelitian ini sudah *fit*. Hasil uji statistik F adalah sesuai tabel berikut:

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik F**

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1793.626	3	597.875	43.080	.000
	Residual	1443.337	104	13.878		
	Total	3236.963	107			

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Selain Uji F, dilakukan juga Uji statistik T yang pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen/penjelas yang secara individu dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila nilai signifikansi <0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen nya (Ghozali, 2018). Berikut uji statistik t adalah sesuai tabel berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji Statistik t**

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	73,159	8,822		8,293	,000
	SRM	-,221	,066	-,228	-3,349	,001
	SPIP	-,101	,045	-,148	-2,249	,027
	SR	,904	,100	,617	9,021	,000

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan data pada tabel 2, diketahui bahwa yang mempunyai signifikansi lebih kecil dari 0,05 adalah variabel sistem remunerasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sikap rasionalisasi, maka secara parsial variabel-variabel tersebut signifikan

mempengaruhi variabel niat melakukan kecurangan (*Fraud*). Variabel sistem remunerasi menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai beta sebesar -0,221, hal ini menunjukkan arah pengaruh adalah negatif. Maka hal ini menunjukkan **hipotesis 1 diterima**, yang berarti bahwa sistem remunerasi berpengaruh negatif terhadap niat melakukan kecurangan (*Fraud*). Sistem remunerasi yang diterapkan pada suatu instansi terutama untuk instansi pemerintahan berpengaruh negatif terhadap niat untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Artinya semakin baik sistem remunerasi yang ada pada instansi maka semakin kecil kemungkinan pegawai dalam instansi tersebut untuk melakukan tindak kecurangan (*fraud*). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh (Paul Mackay, 1997), (World Bank, 1997) dan (Calvin, 2017). Namun dalam hasil pada penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Martaningtyas, 2014).

Sementara itu, variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,001 dan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai beta sebesar -0,101. Hal ini menunjukkan arah pengaruh adalah negatif. Maka hal ini menunjukkan **hipotesis 2 diterima**, yang berarti bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh negatif terhadap niat melakukan kecurangan (*fraud*). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdapat dalam suatu instansi pemerintah berpengaruh secara negatif terhadap niat untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Artinya semakin baik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diterapkan dalam instansi maka semakin kecil kemungkinan pegawai instansi untuk melakukan tindak kecurangan (*fraud*). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh (Rendika, 2013), (Wiliyanti dkk, 2014) dan (Eliza, 2015). Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Martaningtyas, 2017).

Variabel sikap rasionalisasi menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai beta sebesar 0,904. Hal ini menunjukkan arah pengaruh adalah positif. Hal ini menunjukkan **hipotesis 3 diterima**, yang berarti bahwa sikap rasionalisasi berpengaruh positif terhadap niat melakukan kecurangan (*fraud*). Sikap rasionalisasi yang terdapat dalam diri seseorang dan khususnya pada pegawai yang tergabung dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) berpengaruh secara positif terhadap niat melakukan kecurangan (*fraud*) seseorang. Artinya apabila sikap rasionalisasi yang dimiliki seseorang semakin tinggi maka kemungkinan dalam melakukan tindak kecurangan semakin besar. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nakhasima, 2017) dan (Pamungkas, 2017). Namun hasil pada penelitian ini tidak mendukung penelitian dari (Susandra dan Hartina, 2017).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem remunerasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam suatu instansi pemerintah berpengaruh negatif terhadap niat untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Sementara itu, sikap rasionalisasi yang terdapat dalam diri seseorang dan khususnya pada pegawai yang tergabung dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) berpengaruh secara positif terhadap niat melakukan kecurangan (*fraud*).

**PUSTAKA ACUAN**

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour; Organizational Behaviour and Human Decision Processes, vol. 50, no.2, pp. 179-211. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/074959789190020T>.
- Binde, Per (2016). Gambling-related Embezzlement in The Workplace: A Qualitative Study. *International Gambling Studies*. <https://doi.org/10.1080/14459795.2016.1214165>.
- Calvin, Ojeleye, Yinka (2017). The Impact Of Remuneration On Employees' Performance (A Study Of Abdul Gusau Polytechnic, Talata-Mafara And State Collage Of Education Maru, Zamfara State). *Arabian Journal of Business and Management Review (Nigerian Chapter)*. Vol. 4, No. 2, 2017. [https://www.researchgate.net/publication/318014419\\_The\\_Impact\\_of\\_Remuneration\\_on\\_Employees'\\_Performance\\_A\\_Study\\_of\\_Abdul\\_Gusau\\_Polytechnic\\_Talata-Mafara\\_and\\_State\\_College\\_of\\_Education\\_Maru\\_Zamfara\\_State](https://www.researchgate.net/publication/318014419_The_Impact_of_Remuneration_on_Employees'_Performance_A_Study_of_Abdul_Gusau_Polytechnic_Talata-Mafara_and_State_College_of_Education_Maru_Zamfara_State).
- Crowe, Howarth (2012) "The Mind Behind The *Fraud*ters Crime: Key Behavioural and Environmental Element".
- Dahlia, D. (2013). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Procedings of Population And Human Resource Development 2*. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2587>.
- Dellaportas, Steven (2012). Conversations with inmate accountants: Motivation, opportunity, and the *fraud* triangle. *Accounting Forum*. [https://www.researchgate.net/publication/256979345\\_Conversations\\_with\\_inmate\\_accountants\\_Motivation\\_opportunity\\_and\\_the\\_fraud\\_triangle](https://www.researchgate.net/publication/256979345_Conversations_with_inmate_accountants_Motivation_opportunity_and_the_fraud_triangle).
- Eliza, Yuliana (2015). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4, No. 1. <https://docplayer.info/30800757-Pengaruh-moralitas-individu-dan-pengendalian-internal-terhadap-kecenderungan-kecurangan-akuntansi-studi-empiris-pada-skpd-di-kota-padang.html>.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th Ed.).
- Greenlee, Janet, dkk (2006). An Investigation of *Fraud* in Nonprofit Organization: Occurrences and Deterrent. Working Paper No. 35. [https://www.researchgate.net/publication/228162620\\_The\\_Causes\\_and\\_Consequences\\_of\\_Internal\\_Control\\_Problems\\_in\\_Nonprofit\\_Organizations](https://www.researchgate.net/publication/228162620_The_Causes_and_Consequences_of_Internal_Control_Problems_in_Nonprofit_Organizations).
- Herawati, Trisna, Nyoman, dkk (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Kas, Implementasi Good Government, Moralitas Aparatur Pemerintah Daerah, dan Persepsi Kesesuaian Kompensasi Terhadap Financial *Fraud*. Vol:7 No. 1. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/10152>.
- Martaningtyas, Irna (2014). Pengaruh Tunjangan Kinerja, Sistem Pengendalian Intern, Kultur Organisasi Terhadap *Fraud* Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal TEKUN*. Vol No. 01: 110-124. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/tekun/article/view/280>.
- MS., Rusli, Budiman. (2010). Kebijakan Remunerasi Berbasis Kinerja. *Artikel Guru Besar FISIP Universitas Padjajaran*. [http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2013/10/pustaka\\_unpad\\_kebijakan\\_remunerasi\\_berbasis\\_kinerja.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2013/10/pustaka_unpad_kebijakan_remunerasi_berbasis_kinerja.pdf).

- Nakashima, M. (2017). Can *Fraud Triangle* Predict Accounting *Fraud*?. Evidence From Japan. Chiba University Of Commerce, 1-37. [https://www.rieb.kobe-u.ac.jp/tjar/conference/8th/CC2\\_MasumiNAKASHIMA.pdf](https://www.rieb.kobe-u.ac.jp/tjar/conference/8th/CC2_MasumiNAKASHIMA.pdf).
- Nisak, Chairun, Prasetyo, Fitri (2013). *Sistem Pengendalian Intern Dalam Pencegahan Fraud Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Kabupaten Bangkalan*. (Disertasi Tidak Dipublikasikan) Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
- Novikasari, Yully (2017). Pengaruh Moralitas Individu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada SKPD Kab. Singingi). *JOM Fekon*. Vol.4 No.1. <https://www.neliti.com/id/publications/117544/pengaruh-moralitas-individu-sistem-pengendalian-intern-pemerintah-dan-ketaatan-a>.
- Pamungkas & Desiana, Dwi (2015). Pengaruh Faktor-faktor dalam Dimensi *Fraud Triangle* Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Siswa Kelas XI Akuntansi Negeri 1 Tampel Tahun Ajaran 2014/2015. *Universitas Negeri Yogyakarta*. Diunduh pada 01 Agustus 2020, dari <https://eprints.uny.ac.id/25070/>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Rendika, Michael (2013). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Inspektorat Terhadap Penyalahgunaan Aset. Artikel Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/669/426>.
- Sujana, Edy, dkk (2017). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Susut. Vol. 8 No. 2. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/10422>.
- Susandra, F, & S., Hartina (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan *Fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bogor. *Jurnal Akunida*, 3 (2), 35-55. [https://www.researchgate.net/publication/324500640\\_ANALISIS\\_FAKTOR-FAKTOR\\_YANG\\_MEMPENGARUHI\\_KECENDERUNGAN\\_FRAUD\\_PADA\\_SATUAN\\_KERJA\\_PERANGKAT\\_DAERAH\\_SKPD\\_DI\\_KOTA\\_BOGOR](https://www.researchgate.net/publication/324500640_ANALISIS_FAKTOR-FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI_KECENDERUNGAN_FRAUD_PADA_SATUAN_KERJA_PERANGKAT_DAERAH_SKPD_DI_KOTA_BOGOR).
- Wolfe, David, T., & Dana, R., Hermanson (2004). "The *Fraud Diamond*: Considering the Four Elements of *Fraud*". *CPA Journal*. 74.12 :38-42. <https://digitalcommons.kennesaw.edu/facpubs/1537/>.
- Zahra, Ami (2017). Pengaruh Tekanan, Kesempatan dan Rasionalisasi Terhadap Tindakan Kecurangan (*Fraud*) (Survei pada Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru). *Artikel Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2587>.
- Zainal, Rizki (2013). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Asimetri Informasi, dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan. *Artikel Universitas Negeri Padang*. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/668>.